**DAFTAR PUSTAKA**

**Literatur/Buku**

Adjie, Habib. 2009. Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Bandung: Refika Aditama

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta

Ashshofa*,* Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta

Ashshofa*,* Burhan. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Chomzah, H.Ali Achmad. 2004. *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia*, Jilid I, Jakarta: Prestasi Pustakaraya

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama

Gandawidjaja, Yanly 2002. Peran Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Sementara Dalam Proses Pendaftaran Tanah, Bandung: Universitas Katolik Parahyangan

H. Salim HS. 2017. Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa.

Harsono, Boedi. 1999. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi Dan Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan

Harsono, Boedi. 2003. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Cetakan Kesembilan. Jakarta: Penerbit Djambatan

Harsono, Boedi. 2008. Hukum Agaria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang – Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok – Pokok Agraria, isi dan Pelaksanaannya, Jilid 2, Jakarta: Djembatan

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang: Bayumedia Publishing.

Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,* Malang: Bayumedia Publishing.

Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Buku Pintar Linux: Membangun Aplikasi e-Government*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Makarim, Edmon. 2005. Pengantar Hukum Telematika : Suatu Kompilasi Kajian, Jakarta: PT. Raja Grafindo

Mertokusumo, Sudikno. 1998. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Mertokusumo, Sudikno. 1999. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, (selanjutnya ditulis Sudikno Mertokusumo III)

Mertokusumo, Sudikno. 2006. Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty

Mulyono, Eugenia Liliawati. 2003. *Tinjauan Yuridis Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dalam Kaitannya dengan Pemberian Kredit oleh Perbankan*, Jakarta: PT. Harvarindo

Patrik, Purwahid dan Kashadi. 2006. Hukum Jaminan Edisi Revisi Dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Semarang Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

R.Soegondo. 1991. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramita

Rahman, Hasannudin. 1995. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Setiabudi, Jayadi. 2015. Pedoman Pengurusan Surat Tanah & Rumah Beserta Perizinannya. Yogyakarta: Penerbit Buku Pintar

Situmorang, Victor M. dan Cormentyna Sitanggang. 1993. Gross Akta dalam pembuktian dan Eksekusi. Jakarta: Rineka Cipta

Sjahputra, Iman, *Problematika Hukum Internet Indonesia*, Jakarta: PT. Prenhallindo, 2002.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. 2011. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta, Bandung: Mandar Maju

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

Soerodjo, Irwan. 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arkola

Soerojo, Herlien 2003. Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia. Surabaya: Arloka

Subekti. 2005. Hukum Pembuktian, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha

Yulianto. 2004. *Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Akta Jaminan Kredit Perbankan*. Surabaya: Mitra Usaha Abadi.

**Jurnal Penelitian**

Andiyanto, Krisnawan, dkk. 2021. *“Penerapan Pendaftaran Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik Di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru”*, Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas. April. Volume 6, No 1.

Ariyanto, Didik. 2006. *Pelaksanaan Fungsi Dan Kedudukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Kabupaten Gobrongan*. Semarang. Tesis. PPS Universitas Diponegoro

Gunarta, I Made Dwi Nurasa, Akur Pinuji, dan Sukmo. 2020. *“Persepsi Kreditur dan PPAT Terhadap Kualitas Layanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik"*. Jurnal Tunas Agraria. September. Volume 3, No. 3

Hidayat, Nurman. 2014. *“Tanggung Jawab Penanggung Dalam Perjanjian Kredit”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Volume 2, No. 4.

Imron, Abdul Kholiq and Moch Najib Imanullah. 2017. “*Pembebanan Hak Tanggungan Terhadap Objek Tanah Yang Belum Terdaftar Beramaan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali*,”. Repertorium 4. No. 29, diakses pada https://jurnal.uns.ac.id/repertorium/article/view/18232 tanggal 26 Juni 2022

Kristianty, Erosa & Cahyarini, Luluk Lusiati. 2021*. “Pertanggung Jawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik”*. Jurnal Notarius. Volume 14, No 2.

Kurniati, Nia dan Efa Laela Fakhriah. 2017. *BPN Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah di Indonesia Pasca PERKABAN No.11 Tahun 2016*, Jurnal Sosiohumaniora. Vol. 19, No. 2

Noviaditya, Martha. 2010 *“Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan”*, Skripsi Fakultas Hukum. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta

Nurwulan, Pandam. 2021. *“Implementasi Pelayanan Hak Tanggungan Elektronik Bagi Kreditor dan Pejabat Pembuat Akta Tanah”*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. Januari. Volume 28 No. 1.

Sahnan, M.Arba dan L Wira Pria Suhartana. 2019. *Kewenangan Badan Pertanahan Nasional Dalam Menyelesaikan Sengketa Pertanahan*. *Jurnal IUS*. Vol. 7 No. 3

Sarwoko, Djoko. 2009. *Pembuktian Perkara Pidana Setelah Berlakunya* Undang-Undang *NO.11 Tahun 2008 (Undang-Undang ITE)*. Makalah, 7 September

Sudaryanto, W. 1996. “*Pokok-Pokok Kebijakan Undang-Undang Hak Tanggungan*”, Seminar Nasional Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan tanggal 10 April. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti

Wiguna, I Wayan Jody Bagus. 2021. *“Tinjauan Yuridis Terkait Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik”*. Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas. April. Volume 5, Nomor 1

**Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 *jo.* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang penyelesaian kasus pertanahan.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah